

**TINJAUAN *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP KESADARAN  
MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN (PBB)  
(Studi di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan  
Kabupaten Way Kanan)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana S1 (Hukum)  
Dalam Ilmu Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Oleh:**

**DEA INDAH MONICA**

**NPM : 1621020473**

**Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2020 M**

**TINJAUAN *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP KESADARAN  
MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN (PBB)  
(Studi di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan  
Kabupaten Way Kanan)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana S1 (Hukum)  
Dalam Ilmu Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**



**Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.**

**Pembimbing II : Rudi Santoso, M.H.I., M.H**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2020 M**

## ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam sebuah negara dan warga negaranya. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang bermanfaat bagi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. pajak sendiri adalah sebuah sumbangan wajib rakyat kepada negara yang sifatnya terutang dan berjangka, baik sebagai subjek pribadi maupun badan usaha. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 78 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu bahwa: Subjek Pajak adalah orang pribadi atau orang yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai, serta memperoleh manfaat atas bangunan.

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah : 1) Bagaimana kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan 2) Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan 2) Untuk mengetahui tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), dengan pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian masyarakat memiliki kewajiban untuk membayar pajak, menurut *siyasah dusturiyah* hal itu wajib bagi masyarakat mampu yang sudah terkena pajak, tetapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak di Desa Gunung Labuhan belum optimal. Ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat wajib pajak, dimana masih kurangnya kesadaran akan kewajibannya untuk membayar pajak sehingga petugas pemungut pajak pun kesulitan dalam pemungutan pajak. Hal inilah yang menyebabkan pembayaran pajak bumi dan bangunan tidak berjalan secara efektif. Dengan demikian, masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama ataupun negara dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yaitu kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa kepada masyarakat tentang pentingnya membayar PBB, besarnya pajak yang ditanggung oleh wajib pajak, keadaan ekonomi dan tidak adanya sanksi yang tegas kepada wajib pajak.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dea Indah Monica  
NPM : 1621020473  
Jurusan : Siyasah Syar'iyah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Studi di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2 Oktober 2020

Penulis,

Dea Indah Monica  
NPM. 1621020473





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH  
TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT  
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN (PBB) (Studi Di Desa Gunung  
Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan  
Kabupaten Way Kanan)**

Nama : **Dea Indah Monica**  
NPM : **1621020473**  
Jurusan : **Siyasah Syar'iyah**  
Fakultas : **Syariah dan Hukum**

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqosyahkan dan dipertahankan dalam  
Sidang Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
**NIP.196210221993031002**

Pembimbing II

**Rudi Santoso, M.H.I., M.H**  
**NIP.**

Ketua Jurusan

**Erenki M.Si**

**NIP.198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (Studi di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)"** Disusun oleh **Dea Indah Monica, NPM. 1621020473** program studi **Siyasah Syar'iiyyah**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan pada hari Senin, 12 November 2020.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Frenki, M.Si.**

(.....)

**Sekretaris : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.**

(.....)

**Penguji I : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.**

(.....)

**Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H.**

(.....)



**Mengetahui.  
Dean Fakultas Syariah dan Hukum**

**Dr. H. Khairuddin, M.H**  
**NIP.196210221993031002**



## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An-Nisa [4] : 59)



## PERSEMBAHAN

Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Iwan Setiawan dan Ibu Iyah Juriyah yang senantiasa mendo'akan dengan ikhlas lewat doa-doanya, memberikan dukungan baik moril maupun materil, yang tidak pernah bosan menasehati dan membimbing dengan penuh kasih sayang, terimakasih atas curahan kasih sayang kalian yang tak terhingga sampai menuntun penulis pada tahap akhir. Kasih sayang dan cinta tulus kalian sepanjang masa.
2. Nenek tercinta saya Ibu Siti Rohmah beserta keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang senantiasa mendukung dan mendoakan dalam keadaan apapun, merawat dengan sepenuh hati dan yang selalu menjadi orang terdepan dalam segala keadaan.
3. Saudara-saudara saya Justitia Rikalam, Dimas Aji, Bilqis Sarela, Baby Andara, Nindy dan Ibu Rohma Yati tercinta, terimakasih berkat senyum, doa dan semangatnya saya mampu menyelesaikan skripsi.
4. Teman dekat saya Lisa Anisa Fricchillia dan keluarga KB terimakasih selalu menemani hari-hari sepanjang perkuliahan, selalu memberikan semangat dan selalu membantu dalam keadaan apapun.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugrahi nama Dea Indah Monica dari ibu dan bapak yang merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Dilahirkan pada tanggal 06 Juni 1998 di Serang. Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

1. Pada tahun 2003 menempuh pendidikan TK Islam An-Nur Serang Banten selesai pada tahun 2004.
2. Pada tahun 2004 melanjutkan pendidikan ke SDN 01 Gunung Labuhan dan diselesaikan pada tahun 2010.
3. Pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 01 Bukit Kemuning dan diselesaikan pada tahun 2013.
4. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 01 Bukit Kemuning dan terselesaikan pada tahun 2016.

Pada tahun yang sama 2016, penulis melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah di Jurusan Siyasah.

Bandar Lampung, 2 Oktober 2020

Penulis

**Dea Indah Monica**  
**NPM. 1621020473**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas taufik hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Studi di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan”*.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syariah, Universitas Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus tercinta.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, MH. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sekaligus sebagai pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis.



3. Bapak Rudi Santoso, MHI., MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
4. Bapak Frenki M.Si dan Bapak Hervin Yoki Pradikta M.H.I selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Siyasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu dan membimbing penulis dalam proses belajar di Kampus.
5. Bapak/ibu Dosen, beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
6. Kepada pimpinan dan karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, perpustakaan Fakultas Syariah dan perpustakaan Daerah Kota Bandar Lampung yang telah berkenan meminjamkan literatur kepada penulis.
7. Bapak/ibu Aparatur Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan yang telah memberikan izin penelitian dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah angkatan 2016 Khususnya Siyasah Kelas G yang telah bersama-sama bertukar informasi, berbagi keluh kesah dan berjuang mewujudkan cita-cita.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis, namun telah membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kritik dan saran dalam perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama islam.

**Bandar Lampung, 02 Oktober 2020**

**Penulis**

**Dea Indah Monica**  
**NPM. 1621020473**





## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian .....	9
E. Rumusan Masalah .....	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Signifikasi Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian.....	10

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Kajian Teori.....	20
1. Pajak Bumi dan Bangunan .....	20
a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	20
b. Asas Pajak Bumi dan Bangunan.....	24
c. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan .....	24
d. Nilai Jual Objek Pajak dan Pengurangan pajak .....	28
e. Tata cara pembayaran dan penagihan .....	31
f. Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan .....	33
2. Payung Hukum Tentang Pajak Bumi dan Bangunan .....	36
a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.....	36
b. Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan .....	39
3. Pajak Menurut Hukum Islam.....	42
a. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah .....	42
b. Pengertian Pajak Menurut Syariah .....	47
c. Pajak Pada Masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin .....	50
d. Pendapat Ulama Tentang Pajak .....	53
B. Tinjauan Pustaka .....	57

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	61
1. Sejarah Desa Gunung Labuhan .....	61
2. Keadaan Geografis .....	61
3. Struktur Organisasi.....	63
4. Visi dan Misi .....	64
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan .....	66
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .....	69

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gunung Labuhan.....	84
B. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Gunung Labuhan.....	91

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	96
B. Rekomendasi .....	97

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>103</b>



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Penegasan terhadap istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan di dalam memahami skripsi ini. Adapun judul penelitian ini adalah **“TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (Studi di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)”** untuk lebih memahami maksud dari penulisan tersebut, maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian para pembaca sebagai berikut:

1. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* adalah meninjau pandangan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Kajian ini juga membahas hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara.<sup>1</sup>
2. Kesadaran masyarakat adalah sejumlah manusia dalam keadaan mengerti akan harga dirinya yang timbul karena ia diperlakukan secara tidak adil, hal yang dirasakan atau dialami seseorang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia group, 2011), h. 177.

<sup>2</sup>Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011), h. 1199.

3. Membayar Pajak bumi dan bangunan adalah memberikan uang pajak yang bersifat kebendaan, serta besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah dan bangunan. Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak.<sup>3</sup>

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka skripsi ini mengkaji tentang kesadaran masyarakat dalam membayar pajak berupa bumi dan bangunan yang terjadi di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan ditinjau dari siyasah dusturiyah.

#### **B. Alasan Memilih judul**

Ada beberapa alasan menarik, sehingga penulis terdorong untuk membahas masalah ini dalam bentuk karya ilmiah, antara lain:

1. Alasan Objektif

Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan, yang pada akhirnya akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

2. Alasan subjektif

- a. Pembahasan ini diangkat dikarenakan belum ada yang membahas di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Pembahasan ini sangat memungkinkan untuk dibahas dan diteliti karena tersedianya literatur yang menunjang masalah ini.

---

<sup>3</sup>Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsa, *Pokok-pokok Hukum Perpajakan* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), h. 99.

- b. Pembahasan ini sangat sesuai dengan keilmuan penulis sehingga memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan tentang permasalahan ini.

### C. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>4</sup>

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Maka perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.<sup>5</sup>

Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi negara, pajak juga mempunyai fungsi mengatur atau menjadi alat kebijaksanaan moneter serta mengatur kehidupan dengan mendorong atau mengekang suatu cara hidup, yang menjadi pokok bahasan disini adalah pajak dan khususnya pajak bumi dan bangunan. Lebih luas lagi dari sekedar menjalankan pemerintahan, pajak di negara kita juga dipakai untuk membiayai pembangunan.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Rochmat Soemitro, *Pajak Bumi dan Bangunan* (Bandung: PT. Eresco, 1989), h. 105.

<sup>5</sup>Rochmat Soemitro, Zanal Muttaqin, *Pajak Bumi dan Bangunan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), h. 89.

<sup>6</sup>*Buku Panduan Pajak Bumi dan Bangunan* (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1995), h. 1.



Pembiayaan pembangunan memerlukan uang yang cukup banyak sebagai syarat mutlak agar pembangunan dapat berhasil. Uang yang digunakan untuk itu didapat dari sumber-sumber penghasilan negara. Pada umumnya negara mempunyai sumber-sumber penghasilan yaitu: bumi, air dan kekayaan alam; pajak-pajak, bea dan cukai; retribusi; hasil perusahaan negara; pinjaman; lain-lain sumber, seperti denda-denda, sitaan dan pencetakan uang (*defisit spending*). Dewasa ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBD.<sup>7</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 1 hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan merupakan penerimaan Negara. Pasal 2 ayat 1 hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbalan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Pemerintah Daerah.<sup>8</sup>

Sebagai warga negara Indonesia, kita tentu telah mengetahui bahwa terdapat pajak yang dikenakan terhadap objek berupa tanah dan bangunan yang kita miliki. Negara akan mengenakan pajak atas bumi dan bangunan (PBB) terhadap setiap warga negara yang memiliki, memanfaatkan, atau menguasai tanah dan bangunan.

---

<sup>7</sup>Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Cet. VIII (Bandung: PT. Eresco, 1977), h. 2.

<sup>8</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Bumi didefinisikan sebagai permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sementara bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.<sup>9</sup>

Secara sederhana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objek, sehingga keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak, maka pajak ini disebut pajak yang obyektif, walaupun pajak ini merupakan pajak yang obyektif tetapi pajak ini dipungut dengan surat ketetapan pajak yang pada prinsipnya setiap tahun dikeluarkan.<sup>10</sup>

Hasil penerimaan pajak ini diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara terutama Pemerintah Daerah yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.<sup>11</sup>

Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mengetahui pertimbangan yang mendasari pengenaan pajak terhadap bumi dan bangunan yaitu bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan juga kedudukan sosial ekonomi yang

---

<sup>9</sup>Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Pajak*, h. 241.

<sup>10</sup>Rochmat Soemitro, et. al. *Pajak Bumi dan Bangunan Edisi Revisi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), h. 5.

<sup>11</sup>Herianto Hasra, "Efektifitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Persiapan Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai," *Jurnal* 2007, h. 1.

lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atau memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

Bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, wajar jika masyarakat diwajibkan memberikan sebagian manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak. Guna mewujudkan kelangsungan hidup negara dan guna meningkatkan pembangunan.<sup>12</sup>

Undang-undang tentang pajak bumi dan bangunan menerangkan bahwa yang menjadi subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memiliki, menguasai, serta memperoleh manfaat atas bangunan, jadi yang dikenakan kewajiban untuk membayar PBB yaitu orang atau badan yang mempunyai hak atas bumi atau bangunan yang ditetapkan sebagai subjek PBB atau diwajibkan untuk membayar PBB<sup>13</sup> sedangkan objek PBB yaitu bumi atau bangunan, antara lain: pagar mewah, kolam renang, jalan tol, rumah tinggal, sawah, kebun, bangunan usaha dan lain-lain.

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 78 ayat (1) Undang-undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu bahwa: “yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan.”<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Rochmat Soemitro, Zanal Muttaqin, *Pajak Bumi dan Bangunan*, h. 1-2.

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 242-243.

<sup>14</sup>Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 78 ayat (1).



Keikutsertaan dan kegotongroyongan masyarakat agar dapat tercermin di bidang pembiayaan pembangunan, maka semua objek pajak dikenakan pajak. Undang-undang tentang pajak bumi dan bangunan di dalamnya terdapat bumi atau bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikenakan pajak. Penentuan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan atas objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009, pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Pada pasal 14 ayat (1) UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 juga menjelaskan penerbitan surat tagihan pajak, banyak juga pasal lainnya yang terkait dengan penerbitan surat tagihan pajak tersebut.<sup>15</sup>

Terlaksananya pembangunan dan penyelenggaraan negara dibutuhkan suatu kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat menaati dan melakukan kewajibannya sebagai warga negara, sedangkan pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak dengan baik.

---

<sup>15</sup>Rochmat Soemitro, *Pajak Bumi dan Bangunan*, h. 105.

Al-Mawardi menyebutkan bahwa imam memiliki hak yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu.<sup>16</sup> Hak-hak imam erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk menaati dan membantu, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT (Q.S An-Nisa :59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa [4] : 59).*

Apabila kita sebut hak imam adalah untuk ditaati dan kontribusi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari rakyat untuk taat, membantu dan berperan serta dalam program-program pemimpinnya yang digariskan untuk kemaslahatan bersama seperti halnya pajak.

Berdasarkan pengamatan penulis wajib pajak di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan sudah membayar pajak bumi dan bangunan, tetapi masih belum dapat memenuhi target maksimal dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

<sup>16</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahkam, Asulthaniyah wal Wilayatuh al-Diniyah, Musthafa al-Asabil Halabi*, Cet. III (Mesir), h. 17.

Hal ini dikarenakan beban pajak yang meningkat, keadaan individu (keadaan ekonomi), adanya kesalahan teknis yang dialami wajib pajak, ataupun oleh petugas pajak yang menghambat pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), sanksi yang diterapkan kurang tegas serta status kepemilikan tanah atau bangunan.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting dalam penarikan pajak tersebut. Peningkatan penerimaan pajak dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*.

#### **D. Fokus penelitian**

Penelitian ini berfokus pada kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, dan melihat pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan?



2. Bagaimana *tinjauan siyasah dusturiyah* terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan?

#### **F. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk mengetahui *tinjauan siyasah dusturiyah* terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

#### **G. Signifikasi Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis yaitu sebagai berbagi ilmu pengetahuan kepada para pembaca untuk mengetahui *tinjauan siyasah dusturiyah* terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.
2. Manfaat praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

#### **H. Metode Penelitian**

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan

penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dari penafsiran fakta-fakta.<sup>17</sup>

Metode dalam suatu penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, sebab dengan adanya metode penelitian akan menjadi arah dan petunjuk serta dapat memperlancar bagi suatu penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dikelompokkan dalam dua tipe utama yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis). Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian mencakup terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>18</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari Kantor Desa Gunung Labuhan. Selain penelitian empiris, penelitian ini juga di dukung dengan penelitian normatif yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi. Dalam penelitian ini dilakukan di Desa Gunung Labuhan, yang menjadi informan adalah kepala desa, sekertaris desa, petugas penarikan pajak dan wajib pajak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara kepada informan.

---

<sup>17</sup>Cholid Norobuko Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997), h.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 51.

## 2. Sifat Penelitian

Menganalisis data di suatu penelitian memiliki sifat-sifat seperti deskriptif, evaluatif dan prekriptif. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti.<sup>19</sup>

Deskriptif yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau paparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Disini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut,<sup>20</sup> sedangkan analisis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat dan terarah.<sup>21</sup>

Pada penelitian yang bersifat deskriptif ini, penulis akan meninjau tentang kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek yang dari mana suatu data dapat diperoleh. Pada penelitian empiris (sosiologis), kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh

---

<sup>19</sup>M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 63.

<sup>20</sup>Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 183.

<sup>21</sup>M. Nasir, *Metode Penelitian*, h. 66.



suatu informasi yang diperlukan.<sup>22</sup> Biasanya ada dua data yang digunakan dalam penelitian empiris yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>23</sup>

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat.<sup>24</sup> Data ini diperoleh dari lapangan yang ada kaitannya dengan PBB di Desa Gunung Labuhan. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah sumber aktif yaitu mewawancarai kepala desa, sekretaris desa, petugas pajak yang menangani PBB dan wajib pajak.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber yang peneliti secara tidak langsung melalui media atau prantara (diperoleh atau dicatat pihak lain).<sup>25</sup> Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

---

<sup>22</sup>Lexy J. Ma leong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014), h. 240.

<sup>23</sup>Burhan Ashof, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rhineka Cipta, 1998), h. 44.

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 51.

<sup>25</sup>Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 106.

Bangunan, website, buku-buku yang berkaitan dengan siyasah dusturiyah dan pajak, dokumen yang di dapat dari kantor Desa Gunung Labuhan, serta dokumen-dokumen penunjang lainnya yang bisa untuk menguatkan data primer.

#### 4. Populasi dan Sampel Penelitian

Setelah lokasi penelitian dilakukan, peneliti kemudian menentukan populasi dan sampel. Penjelasan mengenai populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek atau nilai yang teliti dalam populasi dapat berupa orang, lembaga, media dan sebagainya.<sup>26</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 990 wajib pajak.

##### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.<sup>27</sup> Teknik sampel yang digunakan oleh penulis yaitu *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan orang tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tau tentang apa yang kita harapkan

<sup>26</sup>Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 81.

<sup>27</sup>Burhan Ashof, *Metode Penelitian Hukum*, h. 44.

atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti. Dengan kata lain, pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.<sup>28</sup> Pada penelitian ini yang menjadi sampel penelitian yaitu terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, petugas penarikan pajak dan wajib pajak sebanyak sepuluh orang, yaitu lima orang taat pajak dan lima orang yang tidak taat membayar pajak.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian empiris teknik pengumpulan data dalam penelitian empiris terdiri dari tiga teknik yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Tiga teknik tersebut tidak menunjukkan bahwa teknik yang satu lebih unggul atau lebih baik dari yang lain, masing-masing mempunyai kelemahan atau keunggulan.<sup>29</sup> Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 300.

<sup>29</sup>*Ibid*, h. 160-161.

<sup>30</sup>Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan, 2015), h. 107.

Wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Artinya pewawancara dalam mengajukan pertanyaan kepada informan secara bebas menurut irama dan kebijakan wawancara, namun masih dipimpin oleh skema yang telah dipersiapkan oleh pewawancara. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada kepala desa, sekretaris desa, wajib pajak, dan petugas penarikan pajak.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula. Pada observasi ini peneliti menggunakan banyak catatan, seperti daftar *check*, daftar isian, daftar kelakuan dan lain-lain, yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti.<sup>31</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen seperti monograf, catatan, serta buku-buku yang ada.<sup>32</sup> Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait pokok masalah yang diteliti berupa data-data yang berhubungan dengan PBB.

---

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 167-168.

<sup>32</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 57-66.



## 6. Teknik Pengolahan Data

Pegolahan data dalam penelitian hukum empiris, selain pengolahan data peneliti harus memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informan terutama kelengkapan jawaban yang diterima apabila peneliti menggunakan banyak tenaga dalam pengambilan data. Harus ada kejelasan, konsisten jawaban atau informasi dan relevansinya bagi penelitian, disamping itu pula harus diperhatikan adanya keterhubungan antara data primer dengan data sekunder dan diantara bahan-bahan buku yang dikumpulkan.<sup>33</sup> Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>34</sup>
- b. Rekontruksi data adalah pengambilan sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun ulang datanya secara teratur, beruntutan dan sistematis.<sup>35</sup>
- c. Sistematis data adalah menetapkan data menurut karangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dalam hal ini

---

<sup>33</sup>Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, h. 181.

<sup>34</sup>Susiadi, *Metode Penelitian*, h. 122.

<sup>35</sup>Wiranto, *Memahami Pengolahan Data* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 39.

penulis mengelompokkan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klarifikasi dan urutan masalah.<sup>36</sup>

- d. Tabulasi adalah pekerjaan membuat tabel.<sup>37</sup> Data-data yang di dapat disajikan dalam bentuk tabel. Pembuatan tabel tersebut dilakukan dengan cara tabulasi langsung karena data langsung dipindahkan dari data ke karangka tabel yang telah disiapkan tanpa proses prantara lainnya.

## 7. Analisis data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahann data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan fikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.<sup>38</sup>

Adapun setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut akan dikelompokkan dan kemudian data di analisa secara deskriptif kualitatif lalu disusun dan dihubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah kesadaran

---

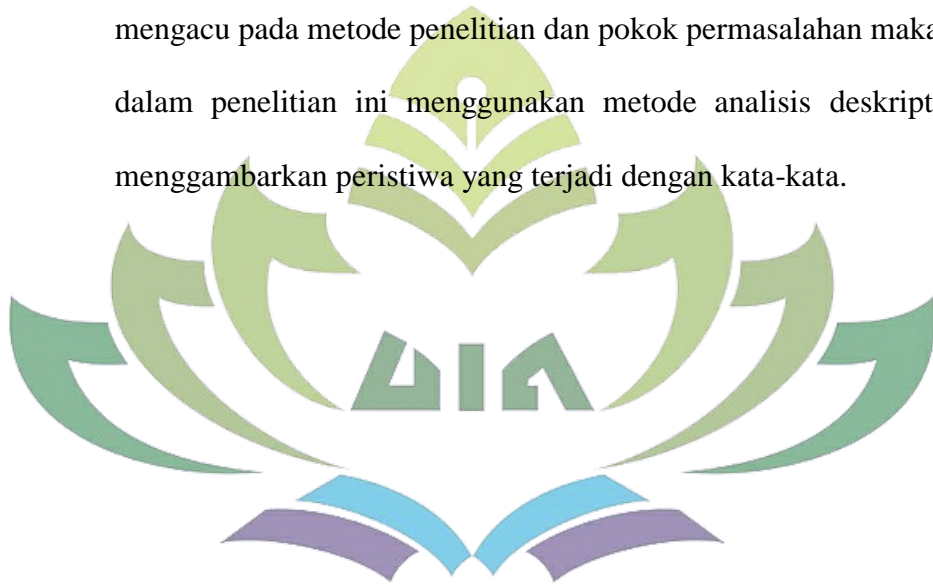
<sup>36</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

<sup>37</sup>Susiadi, *Metode Penelitian*, h. 115.

<sup>38</sup>Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, h. 183.

masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan kemudian diambil kesimpulan.

Mengingat peneliti hanya mengumpulkan data kualitatif saja, dengan demikian data yang terkumpul dibahasakan dan ditafsirkan secara induktif (kesimpulan khusus untuk memperoleh kesimpulan umum) sehingga dapat memberi gambaran yang tepat sesuai dengan apa yang terjadi. Untuk menganalisa data yang diperoleh, dengan mengacu pada metode penelitian dan pokok permasalahan maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yakni menggambarkan peristiwa yang terjadi dengan kata-kata.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pajak Bumi dan Bangunan**

###### **a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Bebagai teori dan definisi pajak telah diberikan oleh para ahli. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: Menurut Prof. Adriani, “pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”<sup>39</sup>

Adapun Rochmat Soemitro berpendapat bahwa, “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak membayar jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”<sup>40</sup>

Mengacu pada definisi resmi di UU KUP yaitu “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan

---

<sup>39</sup>Yustinus prastowo, *Panduan Lengkap Pajak*, h. 7.

<sup>40</sup>Munawir, *Perpajakan* (Yogyakarta: Liberty, 1992), h. 3.



digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>41</sup>

Pemerintah telah menetapkan bagi hasil pajak antara pajak pusat dan daerah, bagi hasil tersebut dalam APBD dapat diketahui dan jenis-jenis pusat pungutannya dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah, yang tergolong pajak pusat adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PPnBM dan bea materai sedangkan yang tergolong pajak daerah pajak rokok, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan lain-lain.<sup>42</sup>

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan. Bumi didefinisikan sebagai permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:<sup>43</sup>

- 1) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
- 2) Jalan tol.
- 3) Kolam renang.

---

<sup>41</sup>Haula Rosdiana Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 67.

<sup>42</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), h.13.

<sup>43</sup>Yustinus prastowo, *Panduan Lengkap Pajak*, h. 240-241.

- 4) Pagar mewah.
- 5) Tempat olahraga.
- 6) Galangan kapal dan dermaga.
- 7) Taman mewah.
- 8) Tempat penampungan atau kilang minyak, air, gas, dan pipa minyak.
- 9) Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Sementara bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan. Sebelum diberlakukannya Undang-undang PBB, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai pajak kebendaan dan kekayaan seperti Ordonasi Pajak Rumah Tangga 1908 yang mengatur pungutan pajak atas tanah dan bangunan, Ordonasi Verponding Indonesia 1923, Ordonasi Verponding 1928 untuk mengatur pungutan pajak atas tanah yang tunduk pada hukum barat, Ordonasi Pajak Kekayaan 1932, Ordonasi Pajak Jalan 1942, Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 11 tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi. Jadi, sebelum diberlakukannya Undang-undang PBB, pemerintah telah mengenakan pajak dan pungutan terkait dengan kepemilikan atau kekayaan dan hasil bumi. Setelah

diberlakukannya Undang-undang PBB, seluruh ketentuan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selain itu, pertimbangan yang mendasari pengenaan pajak terhadap bumi dan bangunan yaitu bumi dan bangunan memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik lagi bagi orang atau badan yang memiliki suatu hak atau memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Maka wajar jika mereka diwajibkan memberikan sebagian manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak, dalam hal ini PBB. Terlebih bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya karena mendapat sesuatu hak dari kekuasaan negara.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak pusat, yang pengenaannya diatur oleh Undang-undang dan dikelola oleh pemerintah pusat. Namun, sebagian besar hasil pungutan PBB tersebut dikembalikan atau diserahkan kepada Pemerintah Daerah yaitu sebesar 80%. Dengan pertimbangan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan masyarakat daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat terdorong untuk memenuhi kewajiban pembayaran PBB, yang sekaligus mencerminkan kegotongroyongan rakyat dalam pembiayaan pembangunan.

**b. Asas Pajak Bumi dan Bangunan**

Asas Pajak Bumi dan Bangunan yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Memberikan Kemudahan dan Kesederhanaan.
- 2) Adanya kepastian hukum.
- 3) Mudah dimengerti dan adil
- 4) Menghindari pajak berganda.

**c. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan**

- 1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia, sementara bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.

Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terhutang. Cara menentukan klasifikasi bumi atau tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

---

<sup>44</sup>Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2013), h. 331-335.



- a) Letak.
- b) Peruntukan.
- c) Pemanfaatan.
- d) Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Cara menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Bahan yang digunakan.
- b) Rekayasa.
- c) Letak.
- d) Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak dibawah ini:<sup>45</sup>

- a) Penggunaannya semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain: masjid, gereja, rumah sakit, pesantren, panti asuhan, museum dan candi
- b) Penggunaannya untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- c) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

---

<sup>45</sup>Yustinus prastowo, *Panduan Lengkap Pajak*, h. 240-242.

- d) Untuk digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- e) Untuk digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

## 2) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai, serta memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi, yang dikenakan kewajiban untuk membayar PBB tidak hanya orang atau badan yang mempunyai hak atas bumi dan bangunan. Orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan pun dapat ditetapkan sebagai subjek PBB atau diwajibkan untuk membayar PBB. Kaitannya dengan pajak bumi dan bangunan, maka yang termasuk subjek pajak PBB yaitu:<sup>46</sup>

- a) Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, atau memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan

---

<sup>46</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2009), h. 316.

demikian, tanda pembayaran atau pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

- b) Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.
- c) Hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 sebagai wajib pajak. Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menentukan subjek wajib pajak, apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya.
- d) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 dapat memberikan keterangan secara tertulis pada Direktur Jendral Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.
- e) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam nomor 4 disetujui, maka Direktur Jendral Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam nomor 3 dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.

- f) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jendral Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasan.
- g) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana huruf d, Direktur Jendral Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.
- i. Apabila Direktur Jendral Pajak tidak memberikan keputusan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari wajib pajak, maka ditetapkan sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak.

**d. Nilai Jual Objek Pajak dan Pengurangan Pajak**

**1) Nilai Jual Objek Pajak**

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat sanksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, h. 382.



a) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama serta telah diketahui harga jualnya.

b) Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

c) Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi objek pajak sektor perdesaan dan perkotaan dan objek pajak sektor perkebunan.

## 2) Pengurangan Pajak

Pengurangan diberikan atas pajak bumi dan bangunan terutang yang tercantum dalam SPPT atau SKP.

Pengurangan pajak terutang dapat diberikan kepada dan dalam hal:<sup>48</sup>

- a) Wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu, objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya.
- b) Wajib pajak orang pribadi atau badan dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa. Termasuk dalam pengertian bencana alam adalah gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang luar biasa adalah kebakaran, kekeringan, wabah penyakit, dan hama tumbuhan. Dalam hal ini dapat diberikan sampai dengan 100% (seratus persen) dari besar pajak terutang.
- c) Wajib pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan. Besarnya pengurangan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besar pajak terutang.

---

<sup>48</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2011), h. 329.

**e. Tata cara pembayaran dan penagihan**

**1) Jangka waktu pembayaran**

Pada pajak bumi dan bangunan belum diberlakukan sistem *self assessment* dan pajak baru harus dibayar setelah ada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP). Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterima surat pemberitahuan pajak terhutang. Pajak yang terhutang berdasarkan surat ketetapan pajak harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima surat ketetapan pajak.

Ternyata terdapat jangka waktu berlainan yaitu 6 bulan dan 1 bulan. Jangka waktu 6 bulan itu diberikan karena wajib pajak memenuhi segala peraturan sehingga diberi kelonggaran selama 6 bulan. Ini berarti bahwa jumlah pajak tersebut dapat dicicil selama 6 bulan setelah diterima SPPT, Tetapi pajak yang terhutang berdasarkan SKP hanya diberikan dalam jangka 1 bulan, Disini sebetulnya ada unsur sanksi karena wajib pajak tidak memenuhi seluruhnya ketentuan Undang-undang.

Pajak harus sudah pada saat hutang jatuh temponya, pembayaran dapat diatur sendiri oleh wajib pajak, asal tidak melampaui batas waktu, Jika pada saat hutang pajak jatuh

tempo dan ternyata pajak belum dibayar atau belum dibayar semua maka dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, untuk jumlah yang sudah jatuh temponya tetapi belum dibayar, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

2) Tempat dan cara pembayaran pajak

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dibayar di Bank, Kantor Pos, Giro dan tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, karena pajak bumi dan bangunan hasilnya sebagian besar akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka dirasa perlu untuk menetapkan tempat-tempat pembayaran yang memudahkan wajib pajak agar Pemerintah Daerah dapat segera memanfaatkan hasil penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan di masing-masing wilayahnya. Kantor Pos dan Giro tersebar dimana-mana sampai ke kota-kota kecil, yang akan sangat memudahkan wajib pajak yang tempat tinggalnya jauh dari kota-kota besar, selain itu Bank terdapat dimana-mana yang juga dapat dimanfaatkan untuk menerima pembayaran pajak bumi dan bangunan. Disamping itu Menteri Keuangan masih dapat menunjuk tempat-tempat lain yang diberi tugas untuk menerima pembayaran PBB.

### 3) Penagihan

Lazimnya jika wajib pajak melakukan kewajibannya membayar pajak pada waktunya, maka tidak akan dilakukan penagihan oleh Kantor Inspeksi Pajak yang bersangkutan. Penagihan baru akan dilakukan oleh Kantor Inspeksi Pajak apabila wajib pajak tidak membayar hutang pajak yang sudah jatuh temponya atau terlambat membayar pajak, sehingga dikenakan sanksi administrasi. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan dasar untuk penagihan pajak.

Jangka waktu 1 bulan STP tidak juga dibayar maka pajak beserta denda dapat ditagihkan dengan surat paksa. Untuk penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa, berlaku Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak-pajak Negara dengan surat paksa sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.<sup>49</sup>

#### f. Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan

- 1) Sanksi pajak bumi dan bangunan bagi wajib pajak
  - a) Apabila Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis

---

<sup>49</sup>Rochmat Soemitro, Zanal Muttaqin, *Pajak Bumi dan Bangunan*, h. 35-37.



tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, ditagih dengan surat ketetapan pajak. Jumlah pajak yang terhutang dalam surat ketetapan pajak adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak, ditagih dengan surat ketetapan pajak. Jumlah pajak yang terhutang dalam surat ketetapan pajak adalah selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang, yang dihitung berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak ditambah denda administrasi 25% dari selisih pajak yang terhutang.

- b) Pajak yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

c) Sebab kealpaan sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal:

- (1) Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jendral Pajak
- (2) Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar.

d) Sebab kesengajaan sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dalam hal:

- (1) Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jendral Pajak
- (2) Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar.
- (3) Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.
- (4) Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya.
- (5) Tidak menunjukan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.

Sanksi untuk sebab kealpaan adalah pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-

tingginya sebesar 2(dua) kali pajak yang terutang. Kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, kurang hati-hati sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi negara. Sedangkan sanksi untuk sebab kesengajaan adalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak yang terhutang. Sanksi pidana ini akan dilipatkan dua, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarkan denda.

Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana perpajakan, maka bagi mereka yang melakukan tindak pidana sebelum lewat satu tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang sejak dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda, dikenakan pidana lebih berat ialah dua kali lipat dari ancaman pidana.

## **2. Payung Hukum Tentang Pajak Bumi dan Bangunan**

### **a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945,

ketentuan-ketentuan perpajakan merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan berdasarkan undang-undang. Undang-undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Sebagaimana yang tercantum pada pasal 78 ayat (1) Undang-undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Pada pasal 77 ayat (1) undang-undang ini menerangkan bahwa yang dimaksud objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan pasal 79 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga rata-rata dari

transaksi jual beli dan merupakan dasar bagi penentuan pengenaan dan cara perhitungan besarnya nilai pajak bumi dan bangunan, khususnya dalam perhitungan besarnya nilai harga jual yang wajar dan umum. Setiap daerah memiliki NJOP yang berbeda dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan. Pada dasarnya semua lahan yang terletak dalam wilayah Indonesia dikenakan pajak kecuali tempat ibadah, kantor pemerintah, kesehatan, kegiatan sosial dan pendidikan. Karena fungsinya untuk melayani kepentingan umum.

Orang atau badan yang menjadi subjek pajak bumi dan bangunan harus mendaftarkan objek pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi letak objek tersebut, sebagaimana yang tercantum pada pasal 83 undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Barulah setelah itu Direktur Jendral Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Berdasarkan pasal 97 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menerangkan bahwa jumlah kekurangan pajak yang terutang



dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Selanjutnya pajak yang terhutang dibayar di Giro, Kantor Pos, Bank dan tempat lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan.<sup>50</sup>

**b. Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota. Transisi otonomi daerah mendorong pajak bumi dan bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan dialihkan dari pajak pusat menjadi pajak daerah, sehingga pemerintah Kabupaten Way Kanan berwenang memungut pajak bumi dan bangunan dalam peraturan daerah.

Pajak bumi bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Way Kanan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten

---

<sup>50</sup>Dadi Adriana, *Himpunan Lengkap Peraturan Perpajakan Buku 2* (Yogyakarta: Andi, 2003), h. 1353-1363.

Way Kanan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Termasuk didalamnya diatur tentang objek dan subjek PBB, dasar pengenaan pajak, surat tagihan denda, pemeriksaan sampai dengan ketentuan pidana.

Sebagai warga negara Indonesia, kita tentu telah mengetahui bahwa terdapat pajak yang dikenakan terhadap objek berupa tanah dan bangunan yang kita miliki, sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menerangkan bahwa objek pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Selanjutnya di ayat (2) menerangkan bahwa yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, menara, tempat penampungan minyak dan jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan.

Selanjutnya pada pasal 4 yang dikatakan subjek pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai serta memperoleh manfaat atas bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjelaskan bahwa dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP dan penetapan besarnya NJOP ditetapkan oleh keputusan Bupati.

Setiap wajib pajak yang sudah mendapatkan SPPT wajib membayarkan pajak terhutangnya. SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih melalui STPD sebagaimana yang tercantum Pada pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pada pasal 23 ayat (2) Bupati juga dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Sanksi dalam perpajakan yang tergolong dalam hukum administrasi memiliki khas seperti sanksi-sanksi yang ada didalam hukum administrasi seperti paksaan pemerintah, penarikan kembali keputusan pemerintah serta pengenaan denda,

namun dalam sanksi administrasi juga sangat dimungkinkan untuk diterapkan sanksi pidana.

Sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan penyidikan pada Perda ini menjelaskan bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana. Selanjutnya menurut pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bahwa pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4000.000,00 (empat juta rupiah).<sup>51</sup>

### 3. Pajak Menurut Hukum Islam

#### a. Pengertian dan ruang lingkup *siyasah dusturiyah*

##### 1) Pengertian *siyasah dusturiyah*

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan

---

<sup>51</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pasal 31.

ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>52</sup> Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.

*Siyasah* secara terminologi dalam lisan al-Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan *dusturiyah* berasal dari bahasa Persia yang berarti *dusturi*. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya kata ini digunakan untuk menunjukan anggota pemuka agama (majusi. Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan.

Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis.<sup>53</sup> Dapat disimpulkan bahwa *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara

---

<sup>52</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 3.

<sup>53</sup><http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html>, Diakses pada tanggal 20 November 2020.



lain konsep-konsep konstitusi, (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. disamping itu kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara yang wajib dilindungi.<sup>54</sup>

Nilai-nilai yang diletakan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum. Tanpa memandang kedudukan, status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *siyasah dusturiyah* akan tercapai.

## 2) Ruang lingkup *siyasah dusturiyah*

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil bersal dari bahasa *dusturiyah* merupakan nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah

---

<sup>54</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 77.

pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas karena didalam *dusturiyah* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan didalam pemerintahan suatu Negara, *dusturiyah* dalam suatu Negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya, yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dusturiyah* tersebut. *dusturiyah* dalam konteks keindonesiaan adalah undang-undang dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sumber *siyasah dusturiyah* yaitu al-qur'an, hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam menerapkan hukum disuatu negeri, kebijakan-kebijakan *khulafa al-rasyidin* didalam mengendalikan pemerintahan, ijtihad ulama dan yang terakhir adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-quran dan hadis.

*Siyasah dusturiyah* merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar suatu Negara yang dijadikan rujukan atau perundang-undangan dalam menegakan hukum. Menurut abdul khallaf wahhab prinsip-prinsip yang diletakan islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan

sterafikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu Negara untuk diterapkan. Baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber penafsirannya.

Sumber material adalah adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok dan objek kajian undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah harus yang harus menimbulkan kemaslahatan bersama. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pembentukan sejarah yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Materi dalam konstitusi itu harus dengan konspirasi dan jiwa dalam masyarakat dalam Negara tersebut, karena itu merupakan cita-cita masyarakat yang ditampung dan harus diwujudkan bersama melalui penguasa. *Siyasah dusturiyah* dapat terbagi kepada:

- a) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlul ahli wa aqli*, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin didalam suatu Negara seperti

undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.

- b) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi* dan lain-lain.
- c) Bidang *siyasah qadlaiyyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan.
- d) Bidang *siyasah idayariyah* termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

#### b. Pengertian pajak menurut syariah

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan *dharibah*,<sup>55</sup> yang berasal dari kata dasar ضَرَبَ ضَرْبًا (*dharaba, yadhribu, dharban*) yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan dan lain-lain. Terdapat di dalam Al-Qur'an, kata pajak dengan akar kata *da-ra-ba* yang terdapat di beberapa ayat, antara lain pada Q.S. Al-Baqarah [2]: 61

...وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ...

Artinya: lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan hinaan.

*Dharaba* dalam bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *dharibah* yang dapat berarti beban.

<sup>55</sup>Gazy Inayah, *Al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah, Dirasah Muqaranah*, Terjemahan oleh Zainudin Adnan dan Nailul Falah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Cet I (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), h. 1001.

*Dharibah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaaib*. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebuah beban (pikulan yang berat).

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*, oleh karena itu *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara. Kitab *Al Ahkam al Sulthaniyah* karya imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa *kharaj* diterjemahkan dengan kata pajak (pajak tanah), sedangkan *jizyah* tidak diterjemahkan dengan kata pajak, melainkan tetap disebut *jizyah*.<sup>56</sup>

Sistem ekonomi konvensional (non-Islam) di dalamnya kita juga mengenal adanya istilah pajak (*tax*), seperti dalam definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Rohmat Soemitro bahwa pajak (*tax*) disini maknanya adalah sebuah pungutan wajib, berupa uang yang harus dibayar, oleh penduduk sebagai

---

<sup>56</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah Fi Al-Wilayaayah Ad Diniyyah*, Beirut, Dar al-Kutub Al-Araby, 1978, Edisi Terj. Oleh Fadli Bahri, Lc, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Cet I (Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 261.



sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan lain-lain. Jadi pajak (*tax*) adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara. Pengertian ini adalah realitas dari *dharibah* sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara. Dengan demikian, *dharibah* bisa diartikan dengan pajak (muslim).

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fikh Az-Zakah*, Gazy Inayah dalam kitabnya *Al-iqtishad al-Islami az-zakah wa ad-Dharibah*, dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, ringkasnya sebagai berikut:<sup>57</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Qadim Zallum bahwa “pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi *baitul mal* tidak ada uang atau harta.”

Definisi diatas terlihat jelas bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh *ulil amri* sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi *dharibah* bukan zakat), karena kekosongan atau kekurangan *baitul mal*, dapat dihapuskan jika keadaan *baitul mal* sudah terisi kembali, diwajibkan hanya

---

<sup>57</sup>Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 31.

kepada kaum muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum muslim), bukan untuk kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.

**c. Pajak Pada Masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin**

Pada masa awal pemerintahan Islam di Madinah (623M) atau tahun 1 hijriah, pendapatan dan pengeluaran negara hampir tidak ada. Rasulullah sendiri adalah seorang kepala negara, pemimpin dibidang hukum, pemimpin dan penanggung jawab dari keseluruhan administrasi. Rasulullah tidak mendapat gaji sedikitpun dari negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil yang pada umumnya berupa bahan makanan. Pada fase awal ini, hampir seluruh pekerjaan yang dilakukan tidak mendapat upah.<sup>58</sup>

Kekayaan pertama yang merupakan sumber pendapatan resmi negara karena dapat digunakan sepenuhnya oleh negara adalah setelah diperolehnya *fay'i*, yaitu harta peninggalan suku Bani Badhir, suku bangsa yahudi yang tinggal di pinggiran Kota Madinah, yang melanggar piagam Madinah.

Adapun sumber pendapatan lain berasal pula dari *kharaj*, yaitu pajak atas tanah yang dipungut kepada non muslim ketika Khaibar ditaklukan, pada tahun ketujuh hijriah. Jumlah *kharaj* dari tanah ini tetap, yaitu setengah dari hasil produksi.

---

<sup>58</sup>Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), h. 175.

Rasulullah dalam mengelola sumber penerimaan negara dan sumber pengeluaran negara ia menyarakannya kepada *baitul mal*. Sesungguhnya ini sudah ada sejak masa Rasulullah Saw, yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan *ghanimah* pada perang badar. Saat itu para sahabat berselisih paham mengenai cara pembagian *ghanimah* tersebut. Allah Swt juga memberikan wewenang kepada Rasulullah Saw. Untuk membagikan sesuai dengan pertimbangan beliau mengenai kemaslahatan kaum muslimin, Dengan demikian *ghanimah* perang badar ini menjadi hak bagi baitul mal, dimana pengelolaannya dilakukan oleh *ulil amri* sesuai dengan pendapatnya untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin.

Pendapatan dan pengeluaran negara masa pemerintahan khulafaurrasyidin, Pada masa Abu Bakar (51 SH-13 H/537-634M), *baitul mal* makin memainkan peranan penting sebagai kas negara. Penerimaan negara dalam hal ini Ara Dal Abu Bakar mengambil langkah-langkah tegas dengan mengumpulkan zakat dari semua umat islam.

Pada tahun kedua kekhalifahannya (12 H/633 M), Abu Bakar merintis embrio *baitul mal* dalam arti yang lebih luas. *Baitul mal* bukan sekedar berarti pihak yang menangani harta

umat, namun juga berarti suatu tempat untuk menyimpan harta negara.<sup>59</sup>

Selanjutnya di zaman Umar bin Khattab (40 SH-23 H/584-644 M) zakat masih tetap sumber pendapatan utama negara Islam. Pada masa pemerintahan Umar tetap memelihara *baitul mal* secara hati-hati, menerima pemasukan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Untuk keperluan baitul mal ini, Umar membentuk kantor-kantornya, mengangkat para penulis, menetapkan gaji-gaji dari harta baitul mal, serta membangun angkatan perang.

Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan (47 SH-35 H/577-656 M), selain pembangunan sektor pertanian yang pesat, Khalifah Utsman juga berhasil membentuk angkatan laut kaum muslimin dibawah komando muawiyah, hingga berhasil membangun supermasi kelautannya di wilayah Mediterania. Namun untuk keperluan tersebut, pemerintahan Utsman harus menanggung beban anggaran yang tidak sedikit untuk memelihara angkatan laut tersebut. Khalifah Utsman tidak mengambil upah dari *baitul mal*, sebaliknya ia meringankan beban pemerintahan, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara.

---

<sup>59</sup>Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wan Nihayah, Masa Khulafaurrasyidin*, Edisi Terjemahan oleh Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Darul Haq, 2002), h. 27.

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib (23 SH – 40 H/600-661 M), menempatkan kembali kondisi *baitul mal* di tempat pada kondisi seperti sebelumnya. Antara lain, memecat beberapa pejabat yang diangkat Utsman, mengambil tanah yang dibagikan Utsman kepada keluarganya tanpa alasan yang benar, memberikan bantuan kepada kaum muslimin berupa tunjangan yang diambil dari baitul mal, dan mengatur kembali tata laksana pemerintahan untuk mengembalikan kepentingan umat.

**d. Pendapat Ulama Tentang Pajak**

Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu boleh, untuk memenuhi kebutuhan negara akan berbagai hal, seperti menanggulangi kemiskinan, menggaji tentara, dan lain-lain yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah, maka harus muncul alternatif sumber baru, bahwa pilihan itu ada dua yaitu pajak atau utang. Selama utang mengandung konsekuensi riba, maka pajak adalah pilihan yang lebih baik dan utama. Pilihan kewajiban pajak ini sebagai solusi. Melahirkan perdebatan di kalangan para fuqaha dan ekonomi islam ada yang menyatakan pajak itu boleh dan sebaliknya.

Sejumlah fuqaha disamping itu ada yang menyatakan pajak itu boleh dipunggut, sebagian lagi mempertanyakan (menolak) hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak, disamping zakat, antara lain: DR. Hasan Turobi dari



Sudan, dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam* menyatakan bahwa “pemerintahan yang ada di dunia muslim dalam sejarah yang begitu lama pada umumnya tidak sah, oleh karena itu fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan.” Ada beberapa alasan ulama memperbolehkan pajak, antara lain:

- 1) Zallum berpendapat: “Anggaran belanja negara pada saat ini sangat berat dan besar, setelah meluasnya tanggung jawab (*Ulil Amri*) dan bertambahnya perkara-perkara yang harus disubsidi. Kadangkala pendapat umum yang merupakan hak *baitul mal* seperti *fay'i*, *jizyah*, *kharaj*, *'ushr* dan *khumus* tidak memadai untuk anggaran belanja negara, seperti yang pernah terjadi di masa lalu yaitu masa Rasulullah, masa khulafaurrasyidin, masa muawiyah, masa abbasiyah, sampai masa utsmaniyah, dimana sarana kehidupan semakin berkembang, sehingga negara harus mengupayakan cara lain yang mampu menutupi kebutuhan pembelajaan baitul mal, baik dalam kondisi ada harta maupun tidak.”
- 2) Maliki berpendapat: “karena menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana seperti keamanan, pendidikan, dan kesehatan adalah wajib, sedangkan kas

negara tidak mencukupi (bukti masih berutang), maka pajak itu menjadi wajib. Walaupun demikian, syara' mengharamkan negara menguasai harta benda rakyat dengan kekuasaannya. Jika negara mengambilnya dengan menggunakan kekuatan dan cara paksa, berarti itu merampas hukumnya haram.”

- 3) Umer Chapra berpendapat “sungguh tidak realistis jika sumber perpajakan (pendapatan) negara-negara muslim saat ini harus terbatas hanya pada lahan pajak (pos-pos penerimaan) yang telah dibahas oleh para fuqaha. Situasi telah berubah dan perlu melengkapi sistem pajak baru dengan menyertakan realitas perubahan, terutama kebutuhan massal terhadap infrastruktur sosial dan fisik bagi sebuah negara berkembang dan perekonomian modern yang efisien serta komitmen untuk merealisasikan muqashid dalam konteks hari ini sambil melengkapi sistem pajak, kita perlu memikirkan, tanpa berdampak buruk pada dorongan untuk bekerja, tabungan dan investasi, serta penerimaan yang memadai sehingga memungkinkan negara Islam melaksanakan tanggung jawab jawabnya secara kolektif.”

Pendapat para ulama jika kita ikuti yang memperbolehkan, maka pajak saat ini memang merupakan sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim, alasannya bahwa

pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan adalah juga kewajiban.

Pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti nafkah untuk para tentara, gaji para pegawai, guru, hakim dan sejenisnya, atau kejadian-kejadian yang tiba-tiba seperti kelaparan, banjir, gempa bumi, dan sejenisnya.

Mengikuti pendapat ulama yang mendukung perpajakan, maka harus ditekankan bahwa mereka sebenarnya hanya mempertimbangkan sistem perpajakan yang adil, yang seirama dengan spirit islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil apabila memenuhi tiga kriteria:

- 1) Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqashid.
- 2) Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- 3) Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

Berbagai pendapat diatas dapat kita simpulkan, bahwa para ulama dan ekonomi Islam memperbolehkan pajak karena adanya kondisi tertentu dan juga syarat tertentu misalnya harus adil, merata, tidak membebani rakyat, dan lain-lain. Ketiga hal diatas harus ditaati, Jika melanggar maka pajak seharusnya dihapus dan pemerintah mencukupkan diri dengan sumber-sumber pendapatan yang jelas ada nashnya serta kembali kepada sistem anggaran berimbang (*balance budget*).

## **B. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu sebagai pedoman penelitian dan bahan perbandingan lebih lanjut serta untuk menghindari adanya kesamaan dan menjamin legalitas penelitian ini.

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka peneliti menemukan ada beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dan dijadikan referensi, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang” yang ditulis oleh Hana Oktaviani, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang 2011. Peneliti ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan metode penelitian kualitatif, dari penelitian tersebut peneliti menyimpulkan terdapat sebab kultural dan historis yang dapat

mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.<sup>60</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Hana Oktavianai yaitu sama-sama membahas tentang kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan, Terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian yang penulis teliti dengan penelitian diatas antara lain: objek penelitian wajib pajak di Kecamatan Gajah Mungkur Semarang, Serta hukum yang diteliti oleh penulis berbeda dengan penelitian diatas.

2. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan pada Pemerintah, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar” yang ditulis oleh Febriani Ramadhani Juwanti, Jurusan Akutansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2017. Hasil dari penelitian ini bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan variabel kesadaran wajib pajak, norma sosial dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.<sup>61</sup> Persamaan penelitian ini

---

<sup>60</sup>Hana Oktaviani, *"Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang"* (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2011).

<sup>61</sup>Febriani Ramadhani Juwanti, *"Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan pada Pemerintah, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar"* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).

dengan penelitian Febriani Ramadhani Juwanti yaitu membahas tentang kesadaran wajib pajak, Perbedaan yang penulis teliti dengan penelitian ini yaitu menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuisioner, objek penelitian di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, hukum yang diteliti dan jenis penelitian kuantitatif.

3. Skripsi yang berjudul “Analisis perkembangan dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo” yang ditulis oleh Digna Debby Widyananda, Program Studi Akutansi, Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yoyakarta 2018. Penelitian ini membahas tentang seberapa besar dan perkembangan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon dari 2012 sampai dengan 2016. Dari penelitian ini diperoleh hasil Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap PAD tahun 2012 s/d 2016 termasuk kedalam kriteria sangat kurang dan perkembangan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap PAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 s/d 2016 fuktuatif, tetapi secara kecenderungan menurun.<sup>62</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian Digna Debby Widyananda yaitu kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah, Perbedaan yang dalam penelitian ini terletak

---

<sup>62</sup>Digna Debby Widyananda, “Analisis perkembangan dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo” (Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yoyakarta, 2018).



pada jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dan subjek penelitian yaitu staf pajak di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo.

4. Skripsi yang berjudul “Pengaruh NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran dan Pendapatan Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gunung Situli Utara” yang ditulis oleh Walfrik Zebua, Program Pascasarjana, Universitas Terbuka Jakarta 2015. Penelitian ini membahas tentang NJOP, pengetahuan, pelayanan, kesadaran dan pendapatan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gunung Situli Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel besaran NJOP, pelayanan, pengetahuan, pendapatan masyarakat dan kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gunung Situli Utara.<sup>63</sup> Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu membahas mengenai NJOP, pengetahuan, pelayanan dan kesadaran dan terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu lokasi penelitian adalah sekolah masyarakat di lingkungan Kecamatan Gunung Situli Utara Kota Gunung Situli, metode dalam pengambilan sampel menggunakan teknik yang digunakan *probability sampling* dan menggunakan metode analisis data regresi linier berganda.

---

<sup>63</sup>Walfrik Zebua, “Pengaruh NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran dan Pendapatan Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gunung Situli Utara” (Skripsi, Universitas Terbuka Jakarta, 2015).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Achmad, Yulianto dan Fajar Nur Mukti Dewata. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Adriana Dadi, *Himpunan Lengkap Peraturan Perpajakan Buku 2*. Yogyakarta: Andi, 2003.
- Ahmadi, Norobuko Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997.
- Ali, Zinuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah Fi Al-Wilayaayah Ad Diniyyah, Beirut, Dar al-Kutub Al-Araby, 1978, Edisi Terj. Oleh Fadli Bahri, Lc, Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*. Cet I. Jakarta: Darul Falah, 2000.
- . *Al-Ahkam, Asulthaniyah wal Wilayatuh al-Diniyah, Musthafa al-Asabil Halabi*. Cet. III. Mesir.
- Ashof, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rhineka Cipta, 1998.
- Buku Panduan Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1995.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Dapartemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2011.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Inayah, Gazy. *Al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah, Dirasah Muqaranah, Terjemahan oleh Zainudin Adnan dan Nailul Falah, Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Cet I. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia group, 2011.
- Katsir, Ibnu. *Al-Bidayah wan Nihayah, Masa Khulafaurrasyidin*. Edisi Terjemahan oleh Abu Ihsan al-Atsari. Jakarta: Darul Haq, 2002.

- Majid, Nazori. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003.
- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2013.
- . *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2009.
- . *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2011.
- . *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munawir, *perpajakan* Yogyakarta: liberty, 1992.
- Nasir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Prastowo, Yustinus. *Panduan Lengkap Pajak*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- Sigit, Angger Pramukti dan Fuady Primaharsa, *Pokok-pokok Hukum Perpajakan* Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Soemitro, Rochmat. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Cet. VIII. Bandung: PT. ERESKO, 1977.
- . *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: PT. ERESKO, 1989.
- Soemitro, Rochmat, et. al. *Pajak Bumi dan Bangunan Edisi Revisi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- Soemitro, Rochmat dan Zanal Muttaqin. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- . *Metode Penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan, 2015.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Wiranto. *Memahami Pengolahan Data*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Yulianto, Achmad dan Mukti Fajar Nur Dewata. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Zinuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

### **Jurnal**

Hasra Herianto, "Efektifitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Persiapan Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai," Jurnal 2007.

### **Karya Ilmiah**

Walfrik Zebua, "*Pengaruh NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran dan Pendapatan Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gunung Situli Utara*" (Skripsi, Universitas Terbuka Jakarta, 2015).

Digna Debby Widyananda, "*Analisis perkembangan dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo Studi Kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo*" (Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018).

Febriani Ramadhani Juwanti, "*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan pada Pemerintah, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar*" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).

Hana Oktaviani, "*Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang*" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2011).

### **Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Bapak Aldi Antonius selaku Kaur Umum Desa Gunung Labuhan pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 14:00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Ardani selaku petugas penarikan pajak di Desa Gunung Labuhan pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 15:30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Baidi selaku wajib pajak di Desa Gunung Labuhan pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 09:25 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Edi Nurzaman selaku wajib pajak di Desa Gunung Labuhan pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 16:30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Gunaryo selaku Sekertaris Desa Gunung Labuhan pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 14:30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Jamaludin selaku wajib pajak di Desa Gunung Labuhan pada tanggal 13 Agustus 2020 pukul 19:30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Maanseh selaku wajib pajak di Desa Gunung Labuhan pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 16:00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Meri selaku wajib pajak di Desa Gunung Labuhan pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 08:30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Mujiono selaku wajib pajak di Desa Gunung Labuhan pada tanggal 12 Agustus 2020 pukul 16:45 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Rasman Wani selaku wajib pajak di Desa Gunung Labuhan pada tanggal 12 Agustus 2020 pukul 16:30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Saleh selaku petugas penarikan pajak di Desa Gunung Labuhan pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 18:30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Saparudin selaku petugas penarikan pajak di Desa Gunung Labuhan pada tanggal 12 Agustus 2020 pukul 14:00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Surdi selaku wajib pajak di Desa Gunung Labuhan pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 08:30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Ujang Efendi selaku Kaur Pemerintahan Desa Gunung Labuhan pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 13:00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Yanto selaku Kepala Desa Gunung Labuhan pada tanggal 13 Agustus 2020 pukul 19:30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Asmara selaku wajib pajak di Desa Gunung Labuhan pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 10:00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Astuti selaku wajib pajak di Desa Gunung Labuhan pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 09:30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Nila selaku wajib pajak di Desa Gunung Labuhan pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 09:30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Suemi selaku wajib pajak di Desa Gunung Labuhan pada tanggal 10 Agustus 2020 pukul 16:30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Ibu Tri Pisriani selaku kepala bidang PBB dan BPHTB Bapenda Way Kanan pada tanggal 7 September 2020 pukul 10:00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Purnomo selaku petugas penarikan pajak di Desa Gunung Labuhan pada tanggal 7 September 2020 pukul 10:00 WIB.

### **Sumber On-line**

<http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html>, Diakses pada tanggal 20 November 2020.

"Pemerintah Kabupaten Way Kanan". (On-line), tersedia di <https://www.waykanankab.go.id/home> Diakses pada tanggal 14 september 2020.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985, Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-undang Nomor 12 tahun 1994, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 12 tahun 2012, tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 13 Tahun 2017 Tentang *Standart Operating Procedurs* (SOP) Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.